

Warga Terberdayakan jika Tepat Sasaran

Program Hutan Kemitraan yang digagas Kementerian Kehutanan diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dan mengentaskan warga miskin. Alasannya, masyarakat adat dan warga sekitarnya dapat meningkatkan kualitas kehidupan dengan menerapkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, saat membuka Pekan Raya Perhutanan Sosial 2014, di Bandar Lampung, Jumat (7/3), mengatakan, kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan jika mereka mendapat kesempatan mengelola sumber daya hutan dengan baik melalui program Perhutanan Sosial.

"Asalkan program tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang masih berpedoman pada kearifan lokal, sistem nilai, norma, adat istiadat, dan hukum adat masyarakat," ujar Zulkifli.

Persoalan kemiskinan, tambah Zulkifli, juga bisa ditekan dengan mewujudkan peran hutan sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan. "Hutan Kemitraan merupakan sistem pengelolaan kawasan hutan negara, dan hutan hak yang ada, dan masuk program Perhutanan Sosial," lanjut dia.

Dirjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Perhutanan Sosial Hilman Nugroho menambahkan, program Hutan Kemitraan hanya diperuntukkan bagi masyarakat di sekitar wilayah hutan lindung dan produksi. Masyarakat yang ingin ikut program itu dapat memanfaatkan lahan seluas 2 hektar per orang selama 35 tahun dan dapat diperpanjang.

"Warga tidak harus bayar sewa tanah dan PBB. Warga bebas memakai lahan asalkan mau menanam 400 batang tanaman hutan, yang hasilnya bisa dinikmati untuk kesejahteraan mereka," kata Hilman.

Adapun Wakil Gubernur Lampung Joko Umar Said mengatakan, sejak diluncurkan September 2007, Hutan Kemitraan disambut antusias. "Saat ini ada 41 kelompok dengan luas lahan hutan 25.437 hektar yang diusulkan," ujar Joko.